

**DOKUMEN RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang berisikan program, kegiatan, Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dan Rencana kerja pendanaan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan,

2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2020	8
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	20
2.4 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021.....	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB IV PENUTUP	31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD Perubahan) merupakan tahapan perbaikan dan penyempurnaan dari Rencana Kerja Tahun 2021 Murni. Dalam prosesnya, penyusunan Dokumen ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja perubahan Tahun 2021 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1. LATAR BELAKANG

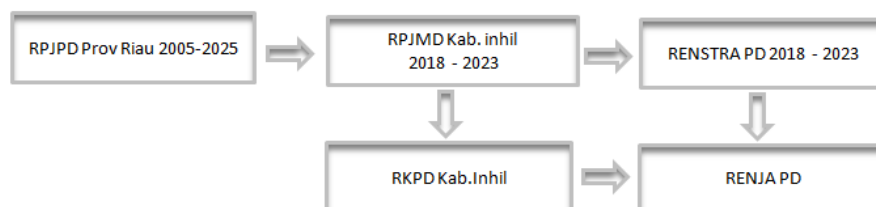
Rencana kerja (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 berpedoman pada rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis (Renstra PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun. Secara skematis hubungan antara rencana strategis (Renstra) sampai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dapat dilihat pada skema berikut:

Skema Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dengan demikian Proses penyusunan perubahan renja 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Perubahan Tahun 2021 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mempunyai fungsi pokok acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun ;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023; dan
 13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023.
 14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud kegiatan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada Triwulan akhir tahun 2021 bagi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Tahun anggaran 2021 terkhusus pada Triwulan akhir Tahun 2021 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

➤ **Visi**

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang harus dicapai oleh Organisasi, dan merupakan salah satu bagian internal dari Visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, sehubungan hal tersebut dan berdasarkan keadaan dan masalah yang ada ada tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir secara analisa terhadap berbagai sektor kekuatan, kelemahan, peluang, dan keadaan maka Visi Pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “ *Kejayaan Inhil yang semakin Maju, Bermartabat.*”

➤ **Misi**

Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk pencapaian visi di atas, yaitu : “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum**”

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN :

Berisikan penjelasan tentang dasar penulisan atau penyusunan Rencana Kerja Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2021 yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja-PD.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN:

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH:

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV PENUTUP :

Berisikan kesimpulan dan saran terhadap isi dari Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Bab ini terdiri dari empat sub bab yakni evaluasi renja sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021.

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan II, sehingga dapat di nilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 14 Program dan 50 kegiatan, dengan anggaran RKPD tahun 2021 sebesar Rp.9,967,000,000,-. Sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi keuangan melalui APBD sebesar Rp. 6,642,363,142,- dengan Rata-Rata Capaian Kinerja sebesar 27,22 % (Rendah) dan capaian keuangan 66,64% (Sangat Tinggi).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMDkabupaten/kota pada Tahun2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
17. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	0.00.00.1.02.10.01.01.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	7.837,07	94	2.473,52	77	2.029,17		237,22		276,15		513,37		2.986,89					
	0.00.00.1.02.10.01.01.001.	1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terlayani	Lembar	4000	4,19	2865	2,84	800	1,15	0	-	800	2,40	800	2,40	3665	5,24	92	125,01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.002.	1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	120	276,28	36	303,81	2	192,00	1	20,58	1	20,58	2	41,16	38	344,97	32	124,87	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.006.	1,3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yg dipelihara/ Perizinan kendaraan	Unit	12	60,00	3	10,85	3	12,00	0	-	0	-	0	-	3	10,85	25	18,08	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.008.	1,4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	Ruang	5	264,63	6	119,82	5	73,82	1	1,07	2	9,14	2	10,21	8	130,03	168	49,14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.010.	1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	31	145,61	17	49,24	31	27,54	5	3,1	15	6,80	20	9,90	37	59,14	118	40,61	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.011.	1,6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	item	6	32,46	3	14,83	6	101,70	1	0,5	1	2,10	2	2,60	5	17,43	87	53,71	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.012.	1,7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	2	23,50	2	8,05	2	5,75	0	-	0	-	0	-	2	8,05	100,00	34,26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.015.	1,8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / majalah yang diadakan	item	21	211,11	6	38,14	21	26,09	0	-	5	5,00	5	5,00	11	43,14	54	20,43	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	0.00.00.1.02.10.01.01.016.	1,9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Logistik yang disediakan	Liter	7500	64,40	2195	22,39	1500	18,40	133	1,0	266	2,00	399	3,00	2594	25,39	35	39,43	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMDkabupaten/kota pada Tahun2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)		13 = 8 + 12		14 (13/7)*100%		16					
	0.00.00.1.02.10.01.01.017.	1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yg disediakan	Kegiatan	5	112,52	2	228,78	1	73,50	0	5,5	0	10,10	0	15,60	2	244,38	40	217,19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.01.018.	1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kali	394	2.041,47	75	523,74	79	282,20	6	13,07	12	31,93	18	45,00	93	568,74	24	27,86	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.01.019.	1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Orang	264	3.926,40	119	1.003,60	66	1.086,30	66	186,10	66	186,10	132	372,20	251	1.375,80	95	35,04	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.01.020.	1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	356	494,50	36	75,43	72	92,72	0	-	0	-	0	-	36	75,43	10	15,25	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.01.027.	1.14 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan yang dibayarkan	Orang	15	180,00	6	72,00	3	36,00	1	6,30	0	-	1	6,30	7	78,30	47	43,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			66,21	60,31		
Predikat kinerja																			S	R		
	0.00.00.1.02.10.01.02.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	877,7	95	874,2	66	607,43		3,09		20,66		23,75		897,95			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.02.005.	2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	150,00	0	-	1	27,66	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.02.007.	2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	3	12,39	3	8,89	0	-	0	-	0	-	0	-	3	8,89	100,00	71,74	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.02.009.	2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	5	57,40	5	86,19	0	-	0	-	0	-	0	-	5	86,19	100,00	150,15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.02.022.	2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Ruang	4	73,41	3	18,93	4	197,59	0	-	0	-	0	-	3	18,93	80,00	25,79	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13 = 8 + 12	14 (13/7)*100%	15	16						
	0.00.00.1.02.10.01.02.024.	2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang terpelihara	Unit	15	118,00	6	57,52	3	16,70	0	-	1	7,14	1	7,14	7	64,66	47	54,79	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	0.00.00.1.02.10.01.02.028.	2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	496	76,50	92	32,44	104	21,00	0	-	16	3,42	16	3,42	108	35,86	22	46,87	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	0.00.00.1.02.10.01.02.052.	2.7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Unit	5	390,00	1	670,23	1	344,48	0	3,09	0	10,10	0	13,19	1	683,42	20,77	175,24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Rata-rata capaian kinerja (%)																			52,82	74,94	
Predikat kinerja																			R	S	
	0.00.00.1.02.10.01.03.	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparat Perangkat Daerah	Persen	80	197,20	20	7,51	0	-	-	-	-	-	-	-	7,51				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	0.00.00.1.02.10.01.03.002.	3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya	Stel	392	197,20	20	7,51	124	-	0	-	0	-	0	-	20	7,51	5,10	3,81	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Rata-rata capaian kinerja (%)																			5,1	3,81	
Predikat kinerja																			SR	SR	
	0.00.00.1.02.10.01.05.	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	133,2	40	31,19	53	41,22	-	-	-	-	-	-	31,19				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	0.00.00.1.02.10.01.05.001.	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Orang	13	133,2	5	31,19	3	41,22	0	-	0	-	0	-	5	31,19	35,38	23,42	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Rata-rata capaian kinerja (%)																			35,38	23,42	
Predikat kinerja																			SR	SR	
	0.00.00.1.02.10.01.06.	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	184,07	40	118,14	17	49,87	-	-	10,6	-	10,6	-	128,74				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)	
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13 = 8 + 12	14 (13/7)*100%	15	16							
	0.00.00.1.02.10.01.06.001.	5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	35	94,35	14	59,04	7	36,27	4	-	2	8,60	6	8,60	20	67,64	57	71,69	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	0.00.00.1.02.10.01.06.004.	5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	5	89,72	2	59,10	1	13,60	0	-	0	2,00	0	2,00	2	61,10	40	68,10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	48,5	69,90		
		Predikat kinerja																		SR	S	
	1.02.10.1.02.10.01.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.02.10.1.02.10.01.15.	6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persen	20	726,94	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.10.1.02.10.01.15.007.	6.1 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kebijakan TIK yang terlaksana	buah	2	90,90	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.10.1.02.10.01.15.011.	6.2 Perencanaan, Pengembangan, Pemeliharaan Layanan Nama Domain dan Sub Domain	Jumlah Domain dan Sub Domain go.id	subdomain	20	72,28	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.10.1.02.10.01.15.013.	6.3 Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian, pengawasan Informasi dan Telekomunikasi	kecamatan	20	563,76	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00	
		Predikat kinerja																		SR	SR	
	1.02.10.1.02.10.01.18.	7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terpenuhinya kerjasama informasi dan media massa.	Persen	20	11.788,79	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.10.1.02.10.01.18.001.	7.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Saluran Informasi Pembangunan Daerah	buah	2	219,18	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.10.1.02.10.01.18.005.	7.2 Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media dan Komunitas	Jumlah Jenis Kemitraan Media dan Komunitas	jenis	2	11.569,61	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00	

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)									
					4	497,15	0	27,13	1	297,98	0	-	6	125,06	6	125,06	6	152,19	15000	8,44	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.10.1.02.10.01.23.01.1.	9.5 Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen TIK yang dibuat	Dokumen																			
	1.02.10.1.02.10.01.23.01.2.	9.6 Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai ke Desa	Lokasi	40	4.781,33	5	443,54	10	446,56	0	-	10	25,47	10	25,47	15	469,01	250	0,12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.10.1.02.10.01.23.01.5.	9.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, telephone Seluler serta signal	Menara	280	1.211,41	165	205,64	280	170,47	0	-	110	26,80	110	26,80	275	232,44	14	1,30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																	2275,9	3,3		
			Predikat kinerja																	ST	SR		
	1.02.10.1.02.10.01.27.	10. Program Pengembangan E-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	Persen	4	818,98	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.10.1.02.10.01.27.0.02.	10.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur e-Government	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur E-Government	lokasi	45	476,56	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.10.1.02.10.01.27.0.03.	10.2 Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Elektronik, Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aplikasi Elektronik Bidang Komunikasi dan Informasi	Aplikasi	1	144,53	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.10.1.02.10.01.27.0.04.	10.3 Layanan PPD Pemerintah Daerah, Media Center dan Pemantauan Isu Publik	Jumlah Petugas Pengelola PPD, Media Center dan Pemantauan Isu Publik	Orang	13	197,89	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00		
			Predikat kinerja																	SR	SR		
	1.02.14.1.02.10.01.	STATISTIK																					
	1.02.14.1.02.10.01.15.	11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	Persen	20	283,75	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.14.1.02.10.01.15.001.	11.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah	Dokumen	2	95,45	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
	1.02.14.1.02.10.01.15.002.	11.2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik	Dokumen	1	188,30	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00		

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPd Kabupaten/kota Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)		
											K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13 = 8 + 12	14 (13/7)*100%	15	16								
		Predikat kinerja																SR	SR				
	1.02.14.1.02.10.01.16.	12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	Persen	20	800,00	15	101,77	15	100,65				6,75		6,75		108,52		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			
	1.02.14.1.02.10.01.16.02.	12.1 Pengolahan data statistik Sektoral	Jumlah Buku yang dicetak	Buku	400	800,00	197	101,77	100	100,65	0	-	0	6,75	0	6,75	197	108,52	0	0,84	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	0	0,84			
		Predikat kinerja																		SR	SR		
	1.02.15.1.02.10.01.	PERSANDIAN																			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.15.1.02.10.01.15.	13. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	Persen	20	152,21	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.15.1.02.10.01.15.001.	13.1 Penguatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimtek Persandian yang terlaksana	Orang	40	152,21	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00		
		Predikat kinerja																			SR	SR	
	1.02.15.1.02.10.01.16.	14. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tercapainya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen	20	800,00	17	112,06	0	-	0	-	-	-	-	-	112,06				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
	1.02.15.1.02.10.01.16.006.	14.1 Pengembangan Layanan keamanan Informasi	Cakupan Pengelolaan, Identifikasi dan Analisa keamanan terhadap Informasi / Aset / Fasilitas / Instalasi Vital data dan Informasi yang dikecualikan	Persen	90	800,00	12	112,06	90	99,34	0	-	21	22,96	21	22,96	33	135,02	26	2,89	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		26	2,89		
		Predikat kinerja																			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :		Komitmen semua pemangku kepentingan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		(1) Pandemi Covid-19 (2) Kesalahan Penentuan Target Kinerja																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :		Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :		Perlu dilakukan penyesuaian RKPd dengan APBD Tahun 2021																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan fungsinya dan merumuskan kebijakan teknis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun dalam struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dapat dilihat pada peraturan daerah Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV yang terdiri dari :

A. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang-bidang terdiri dari

- Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi :
 - Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik.
 - Seksi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya dan Penyediaan Akses Informasi.
 - Seksi Penyediaan Konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publikasi dan Layanan Hubungan Media

- Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data Akses Internet :
 - Seksi Pengembangan, Infrastruktur, Internet dan Akses Internet
 - Seksi Manajemen Data Informasi, Intergrasi Layanan Publik dan Pemerintahan
 - Seksi Keamanan Informasi dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
- Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi:
 - Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
 - Seksi Penyelenggaraan Ekosistem Tik, dan Layanan Nama Domain.
 - Seksi Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Gcio) dan Pengembangan Sumber Daya Tik.
- Bidang Persandian Dan Statistik :
 - Seksi Persandian.
 - Seksi Statistik.
- Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan lembaga teknis bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik lingkup Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data Akses Internet, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, Bidang

Persandian Dan Statistik yang dibentuk dengan peraturan daerah No. 47 Tahun 2016 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembentukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir serta untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

2. Tugas pokok

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Indragiri Hilir yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah unit organisasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.
- b. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewenangan :

- a. Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi
- c. Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi
- d. Bidang Persandian dan Statistik

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Diskominfo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur

keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 untuk Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir adalah:

Prioritas Pembangunan	Kinerja	Target 2021	Program Prioritas	Ket
Peningkatan Kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing, Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2,9	Program Aplikasi Informatika	
	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Buku “Kabupaten	1,00	Program penyelenggaraan statistik sektoral	

	Indragiri Hilir dalam Angka” (judul)			
--	--------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 dan 2020, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan esternal) yang dihadapi Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2021, maka Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan target 2,9, 2. Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website target media online 3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan target 100% 4. Buku “Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka” target 1,00 Judul

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Diskominfo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018–2023.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka

secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2018 - 2023 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi			1,75	2,4	2,9	3,0	3,2	1,75				
2	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)			100	100	100	100	100	100	35	100	100	
4	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka" (judul)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir dengan Fokus pada tujuan SKPD yaitu:

A. Kebijakan pembangunan:

1. Menyusun masterplan pembuatan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang e-government yang menjadi acuan seluruh SKPD untuk membangun TIK agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya
2. Membangun Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TIK di tiap-tiap SKPD sampai ke Desa/Kelurahan
3. Memberikan pelatihan / sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya SPBE di terapkan di setiap SKPD
4. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemkab Inhil dan SKPD
5. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
6. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
7. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika

B. Permasalahan dan hambatan :

1. Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
2. Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

C. Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2020-2021 antara lain:

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan Publik

- Sasaran dan kebijakan RPJMD periode 2018 - 2023
- Sasaran RPJMD Kabupaten Provinsi
- Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Indragiri Hilir memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan

3. Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Satu Data

Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disebut program satu data.

4. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem e-Government dalam SPBE

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan dalam penerapan sistem e-Government yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui SKPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi yang saling terintegrasi antar masing-masing SKPD sampai ke Desa/Kelurahan dalam suatu SPBE

5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi bagi Masyarakat

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal

Perkembangan teknologi pada bidang Komunikasi dan Informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atas kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Perumusan perubahan RKPD adalah proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Renja Perubahan dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang Tersaji dalam awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

VISI : Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat			
MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Makin Responsif, Partisipatif, Inovatif, Efektif dan Berketaatan Hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja DISKOMIN FOPS	Meningkatkan manajemen kinerja: 1.1.1 Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 1.1.2 Peningkatan sarana prasarana aparatur 1.1.3 Peningkatan disiplin dan kapasitas	1.1.1.1 Pemenuhan kebutuhan operasional kinerja 1.1.1.2 Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai 1.1.1.3 Peningkatan mutu, pemberian

		<p>sumberdaya aparatur</p> <p>1.1.4 Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>reward dan punishment bagi aparatur</p> <p>1.1.1.4 Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan</p>
	1.2 Optimalisasi Tata Kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	<p>1.2.1 Arsitektur TIK</p> <p>1.2.2 Tersedianya pusat data yang terintegrasi</p> <p>1.2.3 Pengamanan Sistem Informasi</p> <p>1.2.4 Optimalisasi informasi dan komunikasi publik</p>	<p>1.2.1.1 Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur</p> <p>1.2.1.2 Melaksanakan pembuatan/pemeliharaan aplikasi yang terintegrasi</p> <p>1.2.1.3 Menyusun model arus bisnis aplikasi terintegrasi</p> <p>1.2.2.1 membuat regulasi dan pelaksanaan satu data Kab. Inhil</p> <p>1.2.3.1 Melakukan tatakelola pengamanan system</p> <p>1.2.4.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik</p>

Renja Perubahan ini disusun berdasarkan Renstra dan RKPD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir, Pagu RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 adalah Rp.9.967.000.000,- yang terdiri atas 5 program, 9 kegiatan dengan rincian masing-masing pagu program yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Rp.2.727.680.400,-)
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Rp.5.333.382.900,-)
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Rp.1.705.951.700,-)
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Rp.100.647.000,-)
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (Rp.99.338.000,-)

Pagu APBD Murni tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.15.838.354.462,-. Kemudian setelah adanya perubahan pada pagu kegiatan Tahun 2021 dikarenakan adanya rasionalisasi APBD serta pergeseran pagu anggaran yang menyebabkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 berubah menjadi Rp 15.120.609.157,- dengan rincian masing-masing pagu program yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Rp.6.029.392.007,-)
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Rp.7.934.671.000,-)
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Rp.990.404.800,-)
6. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Rp.62.752.400,-)
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (Rp.103.388.950,-)

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau/Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan terhadap usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD yang disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah. Mengingat asumsi awal penerimaan pembiayaan daerah yang tidak terpenuhi sebagaimana hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020 maka pada perubahan anggaran tahun 2021 ini dilakukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 disajikan dalam 3.1 yang menyajikan program, kegiatan dan pagu Tahun 2021.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2020	Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										Kab.Inhil	DAU							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								15.650.121.112,00	14.954.467.807,00	Kab.Inhil	DAU					14.968.131.162,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	19 Nilai	-		6.218.822.562,00	6.029.392.007,00	Kab.Inhil	DAU				19 Nilai	7.070.567.162,00		
1 ###	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	80 Persen	-		28.661.500,00	29.920.500,00	Kab.Inhil	DAU				80 Persen	21.057.000,00		
1 ### 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Persen		Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	-	28.661.500,00	29.920.500,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	80 Persen	7 Dokumen	21.057.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 ###	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	-		3.981.331.162,00	3.828.457.607,00	Kab.Inhil	DAU				100 Persen	3.981.331.162,00		
1 ### 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Persen		Persen	1 Tahun	30 Orang	-	3.967.731.162,00	3.818.357.607,00	Kab.Inhil	DAU			OPD Diskominfo Kab. Inhil	100 Persen	30 Orang	3.967.731.162,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 ### 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	-	13.600.000,00	10.100.000,00	Kab.Inhil	DAU			OPD Diskominfo Kab. Inhil	100 Persen	1 Dokumen	13.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 ###	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	-		37.800.000,00	37.800.000,00	Kab.Inhil	DAU				100 Persen	37.800.000,00		
1 ### 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan				3 Orang	3 Orang	-	37.800.000,00	37.800.000,00	Kab.Inhil	DAU			0	3 Orang	37.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1 ###	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		Persen	0 Persen	-		-	-	Kab.Inhil	DAU				0 Persen	13.316.000,00		
1 ### 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	Persen		Persen	3 Orang	3 Orang	-	-	-	Kab.Inhil	DAU			OPD Diskominfo Kab. Inhil	0 Persen	3 Orang	13.316.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 ###	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	-		662.636.750,00	676.570.750,00	Kab.Inhil	DAU				100 Persen	590.639.550,00		
1 ### 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan				2 Jenis	3 Jenis	-	3.532.650,00	3.532.650,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	3 Jenis	6.265.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1 ### 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				31 Jenis	12 Jenis	-	254.041.100,00	257.339.100,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	12 Jenis	184.981.250,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1 ### 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Unit	31 Jenis	-	59.535.000,00	64.502.000,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	31 Jenis	74.471.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1 ### 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan				1 Kegiatan	6 Item	-	94.950.000,00	94.986.000,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	2 Jenis	7 Jenis	20.015.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 ### 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				21 Item	260 Eksemplar	-	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	260 Eksemplar	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1 ### 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				79 Kali	10 Kali	-	224.578.000,00	230.211.000,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhuk dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Diskominfo Kab. Inhil	10 Kali	269.907.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan				72 Kali	46 Kali					Kab.Inhil	DAU	Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			Kab. Inhil	10 Kali		STATISTIK	
# 1 ###	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persen	Persen			0 Persen	-	-	-	-	Kab.Inhil	DAU					0 Persen	438.490.000,00		
# 1 ### 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional				1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	1 Unit	438.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ###	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Persen	Persen			100 Persen	-	1.350.503.150,00	1.287.903.150,00		Kab.Inhil	DAU						100 Persen	1.900.833.450,00	
# 1 ### 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat				800 Lembar	20 Persen	-	2.400.000,00	2.400.000,00		Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				OPD Diskominfo Kab. Inhil	20 Persen	2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ### 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan				2 Rekening	1 Rekening	-				Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	1 Rekening		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ### 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				5 Ruang	4 Orang	-	192.000.000,00	85.300.000,00		Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Polukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				OPD Diskominfo Kab. Inhil	4 Orang	476.440.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ###	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan				3 Orang	83 Orang	-				Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	83 Orang		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ### 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	Persen			100 Persen	-	157.890.000,00	168.740.000,00		Kab.Inhil	DAU						100 Persen	87.100.000,00	
# 1 ### 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional/ Lapangan yang dipelihara				3 Unit	3 Unit	-	24.600.000,00	24.100.000,00		Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	3 Unit	31.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ### 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Ruang	1 Unit	-	120.290.000,00	129.140.000,00		Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	1 Unit		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 1 ### 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				104 Unit	104 Unit	-	13.000.000,00	15.500.000,00		Kab.Inhil	DAU					OPD Diskominfo Kab. Inhil	104 Unit	55.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persen	Persen			45 Persen	-	8.218.308.450,00	7.934.671.000,00		Kab.Inhil	DAU						45 Persen	7.075.334.000,00	
# 2 ###	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	Persen	Persen			100 Persen	-	8.218.308.450,00	7.934.671.000,00		Kab.Inhil	DAU						100 Persen	7.075.334.000,00	
# 2 ### 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat, Profile Desa & Talkshow yang di Publikasikan				32 Dokumentasi	32 Publikasi	-	68.540.700,00	48.803.250,00		Kab.Inhil	DAU					Jurnal Masyarakat t - 54 OPD	32 Publikasi	99.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 2 ### 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kerjasama yang di Kelola Melalui Media Cetak, Online dan TV				80 Media	80 Kontrak Kerjasama	-	7.609.801.100,00	7.288.701.100,00		Kab.Inhil	DAU					Jurnal Masyarakat t - 54 OPD	80 Kontrak Kerjasama	6.277.610.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 2 ### 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang di Kelola dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik				90 Persen	15 Plynformasi Publik	-	80.616.700,00	76.116.700,00		Kab.Inhil	DAU					Jurnal Masyarakat t - 54 OPD	15 Plynformasi Publik	75.585.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 2 ### 4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Saluran Informasi Pemerintah yang di Kelola Berupa TV, Radio, Website dan Facebook, Aplikasi Infas				2 Buah	2 Jns Salurn Informasi	-	459.349.950,00	521.049.950,00		Kab.Inhil	DAU					Jurnal Masyarakat t - 54 OPD	2 Salurn Informasi	622.149.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	Persen			80 Persen	-	1.212.990.100,00	990.404.800,00		Kab.Inhil	DAU						80 Persen	822.230.000,00	
# 3 ###	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Jumlah Sub Domain lingkup pmda yang dikelola	Persen	Persen			80 Persen	-	443.598.500,00	414.313.300,00		Kab.Inhil	DAU						80 Persen	63.000.000,00	
# 3 ### 2	Pentalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang di Tatalaksana dan di Awasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20 subdomain	2 Perangkat Daerah	-	49.466.400,00	35.912.200,00		Kab.Inhil	DAU					30 OPD	2 Perangkat Daerah	63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 3 ### 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang Aplikasi/Website-nya yang di Kembangkan				12 Bulan	5 Perangkat Daerah	-	394.132.100,00	378.401.100,00		Kab.Inhil	DAU					30 OPD	5 Perangkat Daerah		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 3 ###	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah yang telah terintegrasi	Persen	Persen			80 Persen	-	769.391.600,00	576.091.500,00		Kab.Inhil	DAU						80 Persen	759.230.000,00	
# 3 ### 1	Pentalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Pengelolaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10 Lokasi	7 Perangkat Daerah	-	282.323.100,00	131.523.100,00		Kab.Inhil	DAU					54 OPD	7 Perangkat Daerah	132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
# 3 ### 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server Pusat Data Pemerintah Daerah yang di Kelola				1 Dokumen	9 Unit	-	197.290.500,00	197.290.400,00		Kab.Inhil	DAU					54 OPD	9 Unit	63.666.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

# 3	### 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Arus Bisnis yang dikembangkan				3 Aplikasi	3 Aplikasi	-	52.267.000,00	50.767.000,00	Kab.Inhil	DAU			54 OPD	3 Aplikasi	277.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, STATISTIK DAN	
# 3	### 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Jaringan dan Infrastruktur TIK yang dibangun sampai ke Desa				10 Lokasi	0 Lokasi	-	-	-	Kab.Inhil	DAU			54 OPD	0 Lokasi	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, STATISTIK DAN	
# 3	### 9	Pengembangan dan Pencelaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang infrastrukturnya dikembangkan dan dikelola				40 Orang	34 OPD/Perangkat Daerah	-	-	-	Kab.Inhil	DAU			54 OPD	34 OPD/Perangkat Daerah	86.344.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, STATISTIK DAN	
# 3	### 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek TIK Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menara Telekomunikasi yang di Laksanakan				280 Menara	4 Orang 280 Kali	-	237.511.000,00	196.511.000,00	Kab.Inhil Kab.Inhil	DAU DAU			54 OPD	4 Orang 280 Kali	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, STATISTIK DAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
# 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																			
# 2	###	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan statistik yang terintegrasi	Persen	Persen			100 Persen	-	80.944.400,00	62.752.400,00	Kab.Inhil	DAU				100 Persen	100.000.000,00		
# 2	###	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	Persen	Persen			100 Persen	-	80.944.400,00	62.752.400,00	Kab.Inhil	DAU				100 Persen	100.000.000,00		
# 2	### 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Mengensi Data Statistik Sektoral yang di Publikasikan				100 Buku	35 Data	-	80.944.400,00	62.752.400,00	Kab.Inhil	DAU	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik			54 OPD	35 Data	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, STATISTIK DAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
# 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																			
# 2	###	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menggunakan sistem persandian	Persen	Persen			20 Persen	-	107.288.950,00	103.388.950,00	Kab.Inhil	DAU				20 Persen	100.000.000,00		
# 2	###	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Persen	Persen			20 Persen	-	107.288.950,00	103.388.950,00	Kab.Inhil	DAU				20 Persen	100.000.000,00		
# 2	### 3	Polaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Informasi yang di Amankan				90 Persen	2 Sistem Informasi	-	107.288.950,00	103.388.950,00	Kab.Inhil	DAU			3 OPD	2 Sistem Informasi	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran dan penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2021 ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2021.

Tembilahan, Oktober 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001